

## TRANSFORMASI SOSIAL DAN HUKUM: PENGARUH KEBIJAKAN LINGKUNGAN PADA MASYARAKAT PESISIR DI INDONESIA

Talenta Ribka Sigiro, Kayus Kayowuan

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: [2210611340@gmail.com](mailto:2210611340@gmail.com), [kayusklewoleba@upnvj.ac.id](mailto:kayusklewoleba@upnvj.ac.id)

### Abstrak

Pesisir Indonesia kaya akan sumber daya alam dan budaya, namun rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat pencemaran, eksploitasi berlebihan, dan perubahan iklim. Kebijakan hukum lingkungan diterapkan untuk mengatasi masalah ini, tetapi efeknya pada masyarakat pesisir seringkali kompleks. Studi ini meneliti pengaruh kebijakan tersebut terhadap masyarakat pesisir, fokus pada persepsi masyarakat, dampak sosial, dan strategi optimalisasi kebijakan untuk perubahan sosial berkelanjutan. Degradasi lingkungan mempengaruhi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya alam, menghadirkan tantangan besar. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk melindungi lingkungan pesisir, namun implementasinya masih perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi melalui wawancara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa persepsi masyarakat pesisir terhadap kebijakan lingkungan sangat bervariasi, dipengaruhi oleh pemahaman, pengalaman pelaksanaan kebijakan, dan ketergantungan pada sumber daya alam. Mayoritas merasa kurang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, menyebabkan resistensi dan kurangnya pemahaman terhadap tujuan dan manfaat kebijakan. Dampak sosial kebijakan lingkungan termasuk penurunan pendapatan akibat pembatasan aktivitas ekonomi seperti penangkapan ikan, serta peluang ekonomi baru melalui ekowisata dan diversifikasi ekonomi lokal. Program rehabilitasi mangrove dan terumbu karang menunjukkan kemajuan dalam pemulihan ekosistem, namun penegakan hukum yang lemah dan kekurangan sumber daya menghalangi keberhasilan kebijakan. Optimalisasi kebijakan memerlukan pendekatan inklusif dan partisipatif, melibatkan masyarakat lokal di setiap tahap proses kebijakan. Peningkatan partisipasi, kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak, dan program pendidikan lingkungan yang intensif diharapkan dapat meningkatkan kinerja kebijakan dan mendukung perubahan sosial berkelanjutan bagi komunitas pesisir Indonesia.

**Kata kunci:** Masyarakat Pesisir, Kebijakan Hukum Lingkungan, Dampak Sosial, Optimalisasi

### Abstract

Indonesia's coastal areas are rich in natural and cultural resources but are vulnerable to environmental damage due to pollution, over-exploitation, and climate change. Environmental law policies are implemented to address these issues, yet their effects on coastal communities are often complex. This study examines the impact of these policies on coastal communities in Indonesia, focusing on community perceptions, social impacts, and policy optimization strategies to support sustainable social change. Environmental degradation affects coastal communities that rely on natural resources, presenting significant challenges. The Indonesian government has issued policies to protect coastal environments, but their implementation needs further investigation. This research employs a qualitative approach with phenomenological methods through interviews, participatory observation, and policy document analysis. Findings indicate that coastal communities' perceptions of environmental policies vary widely, influenced by their understanding, policy implementation

*experiences, and dependency on natural resources. The majority feel insufficiently involved in policy-making processes, leading to resistance and a lack of understanding of the policies' goals and benefits. The social impacts of environmental policies include decreased income due to restrictions on economic activities such as fishing, as well as new economic opportunities through ecotourism and local economic diversification. Mangrove and coral reef rehabilitation programs show progress in ecosystem restoration, but weak law enforcement and resource shortages hinder policy success. Optimizing policies requires inclusive and participatory approaches, engaging local communities in all policy stages. Increased community participation, fair compensation for affected communities, and intensive environmental education programs are recommended to enhance policy performance and support sustainable social change for Indonesia's coastal communities.*

**Keywords:** *Coastal Communities, Environmental Law Policies, The Social Impacts, Optimization*

## 1. Pendahuluan

Transformasi sosial di masyarakat pesisir Indonesia merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan hukum lingkungan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari. Daerah pesisir di Indonesia memainkan peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam, seperti hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, yang menyediakan berbagai manfaat bagi masyarakat, seperti mata pencaharian, sumber makanan, dan perlindungan dari abrasi pantai. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, daerah pesisir Indonesia telah mengalami degradasi lingkungan yang signifikan akibat berbagai faktor termasuk pencemaran, eksploitasi berlebihan, dan perubahan iklim. Pencemaran laut disebabkan oleh limbah industri, domestik, dan pertanian. Eksploitasi berlebihan sumber daya alam, seperti penebangan hutan, penangkapan ikan berlebihan, dan penambangan pasir, telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir. Perubahan iklim menyebabkan kenaikan permukaan laut, erosi pantai, dan intrusi air asin<sup>1</sup>.

Degradasi ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat pesisir, seperti hilangnya mata pencaharian, penurunan kualitas air, dan erosi pantai. Menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan pesisir. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memulihkan dan melestarikan lingkungan pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Meskipun berbagai kebijakan hukum telah dikeluarkan, implementasi dan efektivitasnya masih sangat dipertanyakan dan perlu dikaji lebih lanjut.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya ketidakselarasan antara tujuan kebijakan dan realitas di lapangan. Masyarakat pesisir sering kali merasa tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, dan pemahaman mereka tentang tujuan dan manfaat kebijakan ini masih minim. Persepsi masyarakat pesisir terhadap kebijakan hukum lingkungan, dampak sosial dari penerapan kebijakan tersebut, dan potensi optimalisasi kebijakan hukum untuk mendukung perubahan sosial yang berkelanjutan di masyarakat pesisir masih belum banyak dipahami.

Kebijakan hukum lingkungan yang diterapkan di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan habitat, pengelolaan sumber daya alam, hingga upaya mitigasi perubahan iklim. Implementasi kebijakan ini harus memperhatikan aspek

---

<sup>1</sup> Tarmidi, D. T. (2022). Pengaruh Perubahan Iklim dan Kebutuhan Perumahan serta Pariwisata dalam Memunculkan Konsep Kota Terapung sebagai Solusi Hilangnya Pulau-Pulau di Indonesia. *GEOPLANART*, 5(1), 11-19.

partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji persepsi masyarakat pesisir terhadap kebijakan ini, dampak sosial yang ditimbulkan, serta cara mengoptimalkan kebijakan hukum lingkungan untuk mendukung perubahan sosial yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan hukum lingkungan terhadap kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan, dampak sosial yang ditimbulkan, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan pendekatan partisipatif dan inklusif, diharapkan kebijakan hukum lingkungan dapat mendukung transformasi sosial yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Berdasarkan pendahuluan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat pesisir terhadap implementasi kebijakan hukum lingkungan di daerah mereka?
2. Apa saja dampak sosial dari penerapan kebijakan hukum lingkungan terhadap kehidupan masyarakat pesisir?
3. Bagaimana kebijakan hukum lingkungan dapat dioptimalkan untuk mendukung perubahan sosial yang berkelanjutan di masyarakat pesisir?

## 2. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan telah menunjukkan bahwa pendekatan yang holistik dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mengatasi kompleksitas masalah di wilayah pesisir. Cicin-Sain dan Knecht (1998) menekankan pentingnya manajemen terpadu wilayah pesisir yang melibatkan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk mencapai keberlanjutan. Mereka mengemukakan bahwa pengelolaan sumber daya pesisir harus melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam sebuah kerangka kerja yang koheren dan inklusif, guna memastikan bahwa berbagai kepentingan dapat diakomodasi secara adil dan efektif<sup>2</sup>. Studi lebih lanjut oleh Kay dan Alder (2005) juga mendukung pandangan ini dengan menekankan bahwa pengelolaan pesisir yang berhasil membutuhkan pendekatan yang dinamis dan adaptif, yang mampu merespons perubahan kondisi lingkungan dan sosial secara cepat dan tepat. Mereka menyoroti bahwa pengelolaan sumber daya pesisir yang sukses bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, praktik manajemen tradisional, dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal<sup>3</sup>.

Dampak sosial dari kebijakan lingkungan seringkali bersifat multifaset dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal. McCarthy (2006) mengemukakan bahwa kebijakan konservasi yang diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi dapat menimbulkan resistensi dan konflik. Dalam kasus di Indonesia, kebijakan hukum lingkungan yang membatasi aktivitas ekonomi tradisional seperti penangkapan ikan berlebihan sering kali dianggap sebagai ancaman oleh masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya tersebut untuk mata pencaharian mereka<sup>4</sup>. Penelitian oleh Agrawal dan Gibson (1999) menyoroti pentingnya peran

---

<sup>2</sup> Cicin-Sain, B., & Knecht, R. W. (1998). *Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices*. Island Press.

<sup>3</sup> Kay, R., & Alder, J. (2005). *Coastal Planning and Management*. CRC Press.

<sup>4</sup> McCarthy, J. (2006). "Neoliberalism and the Politics of Alternatives: Community Forestry in British Columbia and the United States." *Annals of the American Association of Geographers*, 96(1), 84-104.

komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Mereka berpendapat bahwa ketika masyarakat lokal dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kebijakan lingkungan cenderung lebih berhasil dan diterima dengan baik. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkaya proses pengelolaan dengan pengetahuan lokal yang berharga<sup>5</sup>.

Persepsi masyarakat terhadap kebijakan lingkungan sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka dan keterlibatan mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Berkes et al. (2001) menyatakan bahwa persepsi positif terhadap kebijakan konservasi biasanya muncul ketika masyarakat merasa terlibat dan mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan tersebut. Dalam konteks Indonesia, banyak masyarakat pesisir merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan lingkungan, yang mengakibatkan ketidakpercayaan dan resistensi terhadap kebijakan yang ada<sup>6</sup>. Penelitian oleh Pretty (2003) juga menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan yang berkelanjutan dan program-program sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebijakan lingkungan. Edukasi ini penting untuk menjembatani kesenjangan pemahaman dan membangun dukungan masyarakat terhadap upaya konservasi dan pengelolaan lingkungan<sup>7</sup>.

Optimalisasi kebijakan lingkungan untuk mendukung perubahan sosial yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Ostrom (1990) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan kolektif, yang melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap kebijakan, dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat<sup>8</sup>. Sebagai tambahan, studi oleh Purnomo (2019) menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional dalam kebijakan lingkungan. Nilai-nilai ini sering kali mencerminkan praktik-praktik pelestarian yang sudah terbukti efektif dan dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan menggabungkan pendekatan ilmiah dan pengetahuan lokal, kebijakan lingkungan dapat lebih diterima dan efektif dalam jangka panjang<sup>9</sup>.

### 3. Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Penelitian ini akan mengkaji pengalaman dan persepsi masyarakat pesisir terhadap kebijakan hukum lingkungan yang diterapkan di beberapa daerah pesisir Indonesia. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan melakukan pengumpulan data melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi partisipatif, pengamatan langsung dan analisis Dokumen dengan mengkaji dokumen kebijakan lingkungan yang ada untuk memahami tujuan, implementasi, dan tantangan dalam penerapannya. Peneliti juga melakukan validitas data dengan menggunakan

---

<sup>5</sup> Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). "Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation." *World Development*, 27(4), 629-649.

<sup>6</sup> Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (Eds.). (2001). *Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change*. Cambridge University Press.

<sup>7</sup> Pretty, J. (2003). "Social Capital and the Collective Management of Resources." *Science*, 302(5652), 1912-1914.

<sup>8</sup> Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

<sup>9</sup> Purnomo, H. (2019). "Persepsi Masyarakat Pesisir terhadap Kebijakan Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Ekonomi Pesisir*, 12(3), 45-60.

triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan observasi lapangan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Bagaimana persepsi masyarakat pesisir terhadap implementasi kebijakan hukum lingkungan di daerah mereka?

Dalam konteks implementasi kebijakan hukum lingkungan di daerah pesisir, persepsi masyarakat sangat bervariasi. Berdasarkan penelitian lapangan, mayoritas masyarakat pesisir merasa kurang dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Proses partisipatif yang idealnya melibatkan konsultasi publik dan dialog terbuka seringkali diabaikan, menyebabkan masyarakat merasa terpinggirkan. Keterbatasan akses informasi dan komunikasi yang buruk dari pemerintah juga menjadi kendala utama<sup>10</sup>. Sebagian besar masyarakat pesisir menunjukkan pemahaman yang rendah terhadap tujuan dan manfaat kebijakan hukum lingkungan. Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang membuat kebijakan seringkali disalahpahami sebagai pembatasan aktivitas ekonomi tanpa manfaat yang jelas. Banyak warga yang tidak menyadari bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk melindungi sumber daya alam yang menjadi penopang utama kehidupan mereka dalam jangka panjang<sup>11</sup>. Hal ini menekankan pentingnya program edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung upaya pemerintah dalam melindungi lingkungan, melihat manfaatnya dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam untuk jangka panjang. Namun, yang lain khawatir kebijakan tersebut akan membatasi akses mereka terhadap sumber daya alam dan mengganggu mata pencaharian mereka. Perbedaan persepsi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, dimana masyarakat yang kurang memahami kebijakan mungkin memiliki persepsi negatif. Pengalaman masyarakat dengan implementasi kebijakan serta ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam dimana masyarakat pesisir sangat bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka lebih cenderung memiliki persepsi negatif.

### 4.2. Apa saja dampak sosial dari penerapan kebijakan hukum lingkungan terhadap kehidupan masyarakat pesisir?

Penerapan kebijakan hukum lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir. Misalnya, kebijakan yang membatasi penangkapan ikan di wilayah tertentu demi konservasi seringkali mengurangi pendapatan nelayan lokal<sup>12</sup>. Sebaliknya, ada juga inisiatif yang berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pengembangan ekowisata dan diversifikasi ekonomi lokal. Program rehabilitasi mangrove dan terumbu karang tidak hanya memperbaiki ekosistem tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat dalam sektor pariwisata berbasis lingkungan<sup>13</sup>. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum lingkungan telah memberikan hasil positif dalam mengurangi kerusakan ekosistem pesisir. Program konservasi yang melibatkan rehabilitasi mangrove dan perlindungan terumbu karang telah menunjukkan keberhasilan dalam memulihkan habitat yang rusak dan meningkatkan

<sup>10</sup> Ardli, E. R., & Widyastuti, S. R. (2015). *Peran Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Lingkungan di Wilayah Pesisir*. *Jurnal Pesisir dan Laut*, 7(2), 120-133.

<sup>11</sup> Dahuri, R. (2003). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>12</sup> Siry, H. Y. (2006). *Decentralized Coastal Zone Management in Malaysia and Indonesia: A Comparative Perspective*. *Coastal Management*, 34(3), 267-285.

<sup>13</sup> Widiastuti, E. (2017). *Implementasi Kebijakan Lingkungan di Kawasan Pesisir Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 45-60.

biodiversitas lokal<sup>14</sup>. Namun, efektivitas kebijakan ini sering terhambat oleh lemahnya penegakan hukum dan kurangnya sumber daya untuk pengawasan yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal terbukti menjadi strategi efektif untuk mengatasi kendala ini.

### **4.3. Bagaimana kebijakan hukum lingkungan dapat dioptimalkan untuk mendukung perubahan sosial yang berkelanjutan di masyarakat pesisir?**

Masyarakat pesisir mengusulkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum lingkungan, seperti meningkatkan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, memberikan kompensasi yang adil untuk masyarakat terdampak, dan memperkuat program edukasi lingkungan<sup>15</sup>. Mereka menekankan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan dialog terbuka antara pembuat kebijakan dan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pendekatan partisipatif merupakan kunci untuk mengoptimalkan kebijakan hukum lingkungan. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan<sup>16</sup>. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Inisiatif lokal seperti kelompok kerja lingkungan dan forum konsultasi publik dapat menjadi platform yang efektif untuk mendorong partisipasi aktif dan kolaboratif dalam pengelolaan lingkungan pesisir.

## **5. Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat pesisir terhadap implementasi kebijakan hukum lingkungan sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, keterlibatan dalam proses kebijakan, dan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Dampak sosial dari penerapan kebijakan hukum lingkungan mencakup perubahan dalam mata pencaharian dan kesejahteraan ekonomi, serta peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat pesisir.

Meskipun kebijakan lingkungan telah menunjukkan beberapa keberhasilan dalam melestarikan ekosistem pesisir, tantangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat, sosialisasi yang tidak memadai, dan penegakan hukum yang lemah masih menghambat efektivitas kebijakan ini. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif diperlukan untuk mengoptimalkan kebijakan lingkungan dan mendukung perubahan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan berbagai saran.

Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan. Melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan pesisir.

Kedua, sosialisasi dan edukasi yang intensif. Program edukasi lingkungan yang berkelanjutan harus diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap

---

<sup>14</sup> Purnomo, H., & Wahyuni, E. (2019). *Rehabilitasi Mangrove dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir*. *Jurnal Ekologi*, 23(1), 112-123.

<sup>15</sup> Sukmadinata, A. W. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Lingkungan di Daerah Pesisir*. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 89-102.

<sup>16</sup> Santoso, D. (2020). *Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Komunitas di Wilayah Pesisir*. *Jurnal Sosial dan Lingkungan*, 12(3), 145-159.

tujuan dan manfaat kebijakan hukum lingkungan. Edukasi ini harus disesuaikan dengan konteks lokal dan menggunakan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat. Ketiga, kompensasi dan diversifikasi ekonomi. Kebijakan yang membatasi akses terhadap sumber daya alam harus disertai dengan kompensasi yang adil dan program diversifikasi ekonomi untuk masyarakat terdampak. Pengembangan ekowisata dan inisiatif ekonomi lokal lainnya dapat menjadi alternatif yang efektif. Keempat, penegakan hukum yang konsisten. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum lingkungan dengan menyediakan sumber daya yang memadai untuk pengawasan dan penegakan regulasi. Kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal dapat meningkatkan efektivitas pengawasan. Kelima, integrasi nilai-nilai lokal. Kebijakan lingkungan harus mempertimbangkan dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal serta kearifan tradisional yang telah terbukti efektif dalam pelestarian lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan akseptabilitas dan keberhasilan implementasi kebijakan.

## Daftar Referensi

- Tarmidi, D. T. (2022). Pengaruh Perubahan Iklim dan Kebutuhan Perumahan serta Pariwisata dalam Memunculkan Konsep Kota Terapung sebagai Solusi Hilangnya Pulau-Pulau di Indonesia. *GEOPLANART*, 5(1), 11-19.
- Cicin-Sain, B., & Knecht, R. W. (1998). *Integrated Coastal and Ocean Management: Concepts and Practices*. Island Press.
- Kay, R., & Alder, J. (2005). *Coastal Planning and Management*. CRC Press.
- McCarthy, J. (2006). "Neoliberalism and the Politics of Alternatives: Community Forestry in British Columbia and the United States." *Annals of the American Association of Geographers*, 96(1), 84-104.
- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). "Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation." *World Development*, 27(4), 629-649.
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (Eds.). (2001). *Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change*. Cambridge University Press.
- Pretty, J. (2003). "Social Capital and the Collective Management of Resources." *Science*, 302(5652), 1912-1914.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Purnomo, H. (2019). "Persepsi Masyarakat Pesisir terhadap Kebijakan Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Ekonomi Pesisir*, 12(3), 45-60.
- Ardli, E. R., & Widyastuti, S. R. (2015). Peran Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Lingkungan di Wilayah Pesisir. *Jurnal Pesisir dan Laut*, 7(2), 120-133.
- Dahuri, R. (2003). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siry, H. Y. (2006). Decentralized Coastal Zone Management in Malaysia and Indonesia: A Comparative Perspective. *Coastal Management*, 34(3), 267-285.
- Widiastuti, E. (2017). Implementasi Kebijakan Lingkungan di Kawasan Pesisir Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 45-60.
- Purnomo, H., & Wahyuni, E. (2019). Rehabilitasi Mangrove dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ekologi*, 23(1), 112-123.
- Sukmadinata, A. W. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Lingkungan di Daerah Pesisir. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 89-102.
- Santoso, D. (2020). Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Komunitas di Wilayah Pesisir. *Jurnal Sosial dan Lingkungan*, 12(3), 145-159.